

**FIGURITAS, TOKOH PANUTAN, DAN KEMANDIRIAN PEMILIH**

**Analisa Penelitian Partisipasi Memilih di**

**Kelurahan Pancor Lombok Timur tahun 2015**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

LEMBAR VALIDASI LAPORAN KEGATAN :

RISET PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

JUDUL :

**FIGURITAS, TOKOH PANUTAN, DAN KEMANDIRIAN PEMILIH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

- |    |                          |         |       |
|----|--------------------------|---------|-------|
| 1. | MUH. SALEH, S.IP., MH    | KETUA   | ..... |
| 2. | Drs. MUSA ALHADY         | ANGGOTA | ..... |
| 3. | TAHARUDIN, SH            | ANGGOTA | ..... |
| 4. | ZINNURAIN, S.Pd          | ANGGOTA | ..... |
| 5. | M. LUTFI SARIFUDIN, S.Ag | ANGGOTA | ..... |

KONSULTAN RISET :  
ROBYAN ENDRUW BAFADAL, M.Si

.....  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
JULI 2015

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor O21/Kpts/KPU Kab-017.433846/IV/ 2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Riset Perilaku Pemilih dalam Pemilu di Wilayah Kabupaten Lombok Timur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur serta Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, Kelompok kerja dimaksud sejak bulan April 2015 telah mencoba melakukan pemetaan terkait kegiatan riset partisipasi dalam pemilu.

Dengan mempertimbangkan efektifitas kegiatan riset, KPU Kabupaten Lombok Timur memutuskan untuk melibatkan Konsultan riset perorangan yaitu Sdr. Robyan Endruw Bafadal, M.Si untuk mendampingi Kelompok Kerja Riset Perilaku Pemilih dalam Pemilu di Wilayah Kabupaten Lombok Timur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Melalui design, term of reference kegiatan riset, serta metodologi riset yang disepakati bersama Kelompok Kerja dan Konsultan riset, kegiatan riset dilaksanakan dengan tema Perilaku Memilih (*Voting Behaviour*) yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Harapan kami hasil riset ini dapat mengantarkan kita untuk menemukenali perilaku memilih oleh pemilih di Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilu, terutama kepentingannya dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait pemilu baik oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu maupun oleh stakeholders lain secara lebih positif dan akurat serta proporsional.

Menyesuaikan dengan persepsi pemilih yang tersimplikasi dalam jawaban responden dalam riset ini serta data dan informasi yang diolah, maka judul riset yang ditetapkan yaitu “ **Figuritas, Tokoh Panutan, dan Kemandirian Pemilih**”

Kami menyadari bahwa fakta sosiologis mengenai perilaku memilih yang disimpulkan pada saat riset ini dilaksanakan, merupakan persoalan yang menyangkut persepsi yang setiap saat dapat saja berubah terutama pada partisipasi dan alasan memilih karena keinginan sendiri (kemandirian pemilih), oleh karena itu kesimpulan riset bahwa partisipasi pemilih tergolong tinggi dengan capaian masing-masing 85 %, 87,5%, dan 82,5% secara berurut untuk Pemilu Legislatif 2014, Pilpres 2014, dan Pilkada 2013, bukanlah capaian yang dapat secara optimis dapat dipertahankan tanpa adanya upaya pemeliharaan momentum dan upaya dalam meningkatkan kesadaran pemilih.

Mengingat tingkat partisipasi pemilih sangat terkait dengan kualitas/kuantitas serta metode sosialisasi/pendidikan pemilih, melalui rekomendasi riset, kami sampaikan bentuk dan metode sosialisasi/pendidikan pemilih yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya oleh Penyelenggara Pemilu.

Pada bagian lain pembahasan perilaku memilih, ditemukan pula beberapa variable bentuk sosialisasi/pendidikan pemilih yang memberikan kontribusi terhadap tingginya partisipasi pemilih, disamping karena alasan pemilih melaksanakan hak pilihnya, yang dapat dicermati lebih jauh dalam rangka penyempurnaan/perbaikan dan/atau pemanfaatan variable yang kondusif dalam pengembangan program/kegiatan yang terkait dengan partisipasi pemilih.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga kegiatan riset ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Semoga hasil riset ini dapat bermanfaat dalam mendorong terwujudnya kualitas pemilu yang semakin baik.

Selong, Juli 2015

<b>KELOMPOK KERJA RISET PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILU DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	MUH. SALEH, SIP., MH	PENGARAH	.....
2.	Drs. MUSA ALHADY	PENANGGUNG JAWAB	.....
3.	ZINURRAIN, S. Pd	KETUA	.....
4.	NURHADI MUIS, SH	SEKRETARIS	.....
5.	TAHARUDIN, SH	ANGGOTA	.....
6.	M. LUTFI SYARIFUDDIN, S. Ag	ANGGOTA	.....
7.	HADI FIRMANSYAH, S.IP	ANGGOTA	.....
8.	L.M. ALWIN AHADI, S.Kom	ANGGOTA	.....
9.	HOLIS ISKANDAR, SH	ANGGOTA	.....

<b>KONSULTAN RISET</b>
ROBYAN ENDRUW BAFADAL, M.Si



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

S A M B U T A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalaamu'alaikum wr. wb

Segala puji milik Allah SWT, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada figure teladan ummat Nabi Besar Muhammad SAW.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kelompok Kerja Riset Perilaku Pemilih dalam Pemilu di Wilayah Kabupaten Lombok Timur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor O21/Kpts/KPU Kab-017.433846/IV/ 2015 tanggal 13 April 2015 serta Sdr. Robyan Endruw Bafadhal, M.Si selaku Konsultan Riset Perorangan dalam kegiatan riset, yang telah mencurahkan perhatian, fikiran dan tenaganya dalam pelaksanaan riset perilaku pemilih dalam pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga dapat tersaji hasil kegiatan dimaksud sebagaimana tertuang dalam laporan hasil riset ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para surveyor dan seluruh responden serta pihak lain terkait yang telah berkontribusi besar dalam proses terwujudnya hasil riset ini.

Sebagaimana kita maklumi, bahwa kegiatan riset ini dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan Komisi Pemilihan Umum yang teknis pelaksanaannya mengacu pada surat KPU Nomor 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu, dengan tema alternative yang dipilih yaitu Perilaku memilih (Voting Behaviour).

Mencermati apa yang telah dihasilkan oleh pelaksana riset sebagaimana tersebut di atas, kami merasakan ada optimisme baru akan terpenuhi harapan adanya perbaikan kebijakan dengan mendasarkan pada hasil kegiatan riset, sehingga kami menganggap bahwa pengembangan riset-riset dengan tema lainnya penting dilaksanakan pada masa-masa selanjutnya.

Hasil riset dengan judul **figuritas, tokoh panutan, dan kemandirian pemilih** yang tersaji ini, memberikan landasan argument yang kuat dan keyakinan khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam merancang program dan kegiatan sesuai dengan potret dan rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan riset ini. Di sisi lain kami juga melihat bahwa hasil riset ini dapat bermanfaat pula bagi stakeholders terkait dengan kepesertaannya dalam pemilihan umum.

Demikian sambutan kami, semoga upaya yang telah kita lakukan senantiasa menjadi catatan positif dan bernilai ibadah. Amin

Billaahitaufiq wal hidaayah

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

K E T U A

MUH. SALEH, S.IP., MH

## **Abstrak**

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui partisipasi memilih di Kabupaten Lombok Timur. Secara lebih spesifik ingin menjawab latar belakang seorang warganegara menentukan pilihannya dalam pemilu. Partisipasi memilih merupakan bentuk partisipasi konvensional yang hampir dilakukan oleh semua warganegara yang telah memenuhi syarat. Kelurahan Pancor menjadi lokasi yang dipilih sebagai *sample* dalam penelitian dengan pertimbangan heterogenitas. Penelitian diadakan pada bulan Mei tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (survei), yaitu kombinasi Multistage Random Sampling dan Cluster Random Sampling untuk area kelurahan. Adapun masing-masing sampel responden dari seluruh populasi yang ada diperoleh dengan proporsi jumlah penduduk dari data BPS yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih serta formula komposisi penentuan sampel secara ilmiah dan berjenjang. Hasil penelitian menemukan tingginya faktor figuritas, tokoh panutan, dan otonom pemilih terhadap partisipasi pemilih di Kelurahan Pancor.



## I. PENDAHULUAN

Apakah partisipasi memilih merupakan satu-satunya bentuk dari partisipasi politik masih menjadi perdebatan di kalangan sarjana ilmu politik. Bagi sebagian kalangan partisipasi memilih (*voting*) hanya salah satu dari sekian banyak bentuk partisipasi politik. Ada banyak bentuk partisipasi yang bisa dilakukan warganegara, baik yang umum dan biasa sampai yang ekstrem sekalipun. Warganegara yang ikut serta dan memperhatikan gosip berita tentang politik dan pemerintahan termasuk telah melaksanakan partisipasi politik. Pun yang paling ekstrem misalnya melakukan kudeta atas pemerintahan yang sah termasuk berpartisipasi dalam politik. Sedangkan bagi yang lain partisipasi kemudian berarti bertindak (*to act*) sehingga bincang-bincang tidak termasuk dalam partisipasi. Dan kemudian tingkat partisipasi politik mencapai puncaknya ketika pemilihan umum. Maka dipersempit partisipasi memilih merupakan partisipasi politik utama warganegara. (Saiful Mujani. R. William Liddle, Kusrido Ambardi, 2011)

Gabriel Almond membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu partisipasi konvensional dan non-konvensional.. Bentuk kegiatan konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang 'normal' dalam demokrasi modern. Bentuk 'non-konvensional' adalah beberapa bentuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Partisipasi konvensional misalnya pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, dan komunikasi individual dengan pejabat politik.

Sementara bentuk non-konvensional meliputi petisi, mengajukan demonstrasi, mogok, perang gerilya dan sejenisnya. Pemberian suara (*voting*) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik, baik yang demokratik maupun otoriter. Pemberian suara merupakan tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik dan elite yang berkuasa. Penolakan untuk ikut memberikan suara dapat dianggap sebagai pernyataan protes secara diam-diam. (dalam Mohtar Masoed dan Colin Mc Andrews, 1978)

Studi perilaku memilih (*voting behavior*) berkisar pada empat pertanyaan, (1) Mengapa seorang memilih partai tertentu dan bukan partai lainnya; (2) Mengapa seseorang memilih kandidat tertentu dan bukan lainnya; (3) Mengapa seseorang bersetia memilih satu partai dari pemilu ke pemilu; (4) sementara ada pemilih yang berganti-ganti pilihan pada tiap kali pemilu.

Secara garis besar ada tiga mazhab yang dipakai dalam penelitian tentang perilaku pemilih, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan ekonomi. **Pendekatan sosiologis** dipelopori oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (*Colombia University Bureau of Applied Science*). Berdasar inilah pendekatan sosiologis dalam studi voting disebut juga sebagai *mazhab Colombia* atau *Kelompok Colombia*. Dalam karya-karya yang diterbitkan kelompok ini diungkapkan bahwa perilaku politik seseorang terhadap partai politik

tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

***Pendekatan Psikologis*** dipelopori oleh Pusat Penelitian dan Survei Universitas Michigan (*University of Michigan's Survey Research Centre*). Karena itulah studi voting yang menggunakan pendekatan psikologis dikenal juga sebagai *mazhab Michigan* atau *Kelompok Michigan*. Pendekatan ini sekurang-kurangnya dimaksudkan untuk melengkapi pendekatan sosiologis yang kadang-kadang dari segi metodologis agak sulit menentukan kriteria pengelompokan masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan bahwa semakin lama dominasi kelas tertentu terhadap partai politik tertentu tidak lagi mutlak.

Pendekatan psikologis yang awalnya dikembangkan di Amerika memusatkan pada tiga aspek, yakni keterikatan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang kepada para calon presiden maupun anggota parlemen, dan orientasi seseorang terhadap isu-isu politik. Misalnya, kalau seseorang mempunyai kecenderungan mengidentifikasi diri dengan Partai Demokrat, dan kemudian terpikat isu-isu dan kandidat, maka dalam pemilu akan memilih Partai Demokrat. Inti pendekatan psikologis adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.

***Pendekatan Ekonomi (rational choice)*** Pendekatan sosiologis dan psikologis mengasumsikan bahwa pemilih telah menentukan pilihannya jauh sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Keputusan untuk mendukung partai politik atau kandidat tertentu telah dilakukan sebelum 'mencoblos' di bilik suara. Pemilih seakan berada pada ruang dan waktu yang kosong, yang keberadaan dan ruang geraknya ditentukan oleh posisi individu dalam lapisan sosialnya. Akan tetapi kedua pendekatan di atas gagal menjelaskan mengapa terjadi variasi atas pilihan terhadap kelompok yang secara psikologis memiliki persamaan karakteristik. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita menjelaskan pergeseran pilihan dari satu pemilu ke pemilu lain dari orang yang sama dan status sosial yang sama. (Muhammad Asfar, 2006)

Dengan demikian, berarti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku pemilih. Terdapat faktor-faktor situasional yang menyebabkan mengapa pemilih mendukung partai atau kandidat tertentu, dan tidak mendukung yang lain. Dengan begitu, para pemilih tidak hanya pasif, tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga aktif dan bebas bertindak. Faktor situasional tersebut adalah isu dan kandidat. Seseorang akan memilih berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya, para pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang rasional.

Untuk menjelaskan perilaku memilih di Kelurahan Pancor penelitian ini menetapkan figuritas, visi peserta pemilu, pemimpin opini, partai politik,

media, dan keinginan sendiri sebagai faktor independen. Tiga kali pelaksanaan pemilihan; Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013, Pemilihan Legislatif tahun 2014, dan Pemilihan Presiden tahun 2014 menjadi bahan kajian dalam menentukan faktor yang menentukan perilaku memilih di Kelurahan Pancor.

Masalah figuritas peserta pemilu menjadi salah satu penjelasan perilaku memilih di Indonesia. Penelitian yang diadakan Saiful Mujani dan William Liddle (tanpa tahun) menunjukkan pentingnya faktor figur pemimpin partai dalam perilaku memilih pasca Orde Baru. Pemilih kemudian mendukung PDI-P karena faktor Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai. Begitu pula dengan PAN dengan Amien Rais, mantan Ketua Umum Muhammadiyah organisasi terbesar kedua di Indonesia, PKB dengan Gus Dur, bekas Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), organisasi islam terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir munculnya Partai Demokrat dengan SBY dan Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto. Mereka memilih pemimpin partai, bukan partainya.

Hal ini dengan jelas dapat dilihat pada pelaksanaan pilukada. Penelitian yang dilakukan Bafadal (2009) peran partai politik sangat minimal, dan digantikan oleh kelompok yang disebut tim sukses atau nama lain. Pemenang pilukada tidak jarang dari pasangan yang didukung koalisi partai dengan suara minimal, bahkan pasangan yang maju melalui jalur independen. Tidak ada korelasi antara dukungan pada partai politik dengan dukungan pada pasangan calon dalam pilukada.

Pemilih memiliki kebebasan relatif dan tidak terikat pada dukungan partai politik. Berdasarkan hal ini kemudian peran partai politik dalam menentukan pasangan calon yang didukung pemilih kemudian kecil sekali, bahkan lebih pada level yang lebih buruk, tidak ada sama sekali.

Perilaku pemilih yang otonom juga dijelaskan oleh Leo Agustanto (2009), pada pemilu/pemilukada pemilih menjadi *swinging voters*. Maksudnya bisa saja pada tahun ini seorang pemilih mendukung pasangan X dan bukan pasangan Y namun lima tahun berikutnya ia akan mendukung pasangan Y bergantung pada apa yang ditawarkan oleh peserta pemilu/pemilukada tersebut. Dengan ringan dan gampang pemilih kemudian berpindah-pindah dari satu pasangan ke pasangan lain. Ini bukan hanya khas Indonesia tetapi merupakan gejala pemilih di negara berkembang, ketika angka masa mengambang (*floating mass*) dan pemilih berayun (*swinging voters*) masih sangat tinggi.

Bila demikian muncul pertanyaan, apakah dengan demikian visi dan misi peserta pemilu begitu penting? Leo Agustanto (2009) membantahnya. Pemilih dipandang tidak mementingkan program peserta pemilu. Mereka berpikir pragmatis, apa yang bisa didapatkan dengan cepat dari peserta pemilu. Bagi pemilih, belum tentu program yang dijanjikan peserta pemilu akan mampu direalisasikan dalam kepemimpinannya nanti. Maka dari itu peserta pemilu kemudian menjawabnya dengan menyajikan kampanye dengan model pembagian sembako, kaos, bahkan dengan membagikan uang dalam jumlah tertentu. Kampanye yang dialogis dan intelektual

dipandang tidak akan mampu menyenangkan dan merebut hati pemilih. Peserta pemilu hanya mengikuti pola pikir masyarakat yang jangka pendek.

Padahal salah satu tujuan pemilihan langsung adalah menipiskan peluang terjadinya politik uang. Sebagaimana disampaikan Joko J. Prihatmoko (2005) pemilukada merupakan ikhtiar untuk menipiskan praktik politik uang. Jika dipilih oleh DPRD maka politik uang sulit untuk dihindarkan, peserta pemilihan akan memberi uang kepada anggota DPRD untuk memilihnya. Dengan pemilihan langsung politik uang tidak akan efektif karena calon pemberi uang tidak mudah melakukan kontrol. Apalagi mekanisme pengawasan pemilukada dilakukan secara ketat oleh lembaga tersendiri (Panitia Pengawas/panwas-sekarang Bawaslu/Panwaslu). Masyarakat bisa bersaksi jika terjadi politik uang.

Mengenai fenomena politik uang, Adjie Alfaraby – Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia – menyampaikan toleransi masyarakat terhadap politik uang masih sangat tinggi. Meskipun tiap daerah tingkat toleransinya berbeda-beda namun umumnya masih menjadi gejala umum dalam pemilu. Hal ini yang membuat persepsi mahal biaya menjadi peserta pemilu. Strategi memenangkan pemilu diasumsikan dengan menyiapkan segunung uang, dukungan banyak partai politik, dan semaraknya kampanye yang mahal.

Salah satu faktor penting dalam partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan keberadaan elit. Sebagaimana dijelaskan Haryanto (2005), elit

merupakan anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan daripada masyarakat lain. Dalam setiap cabang kehidupan selalu muncul kelompok elit ini. Dalam mengendalikan partisipasi politik masyarakat ada dua sifat perilaku yang mungkin dilakukan oleh elit. Partisipasi politik yang sifatnya mobilisir atau dikerahkan terjadi apabila elit mengadakan upaya-upaya untuk melibatkan massa ke dalam aktivitas-aktivitas politik. Sementara itu partisipasi politik yang sifatnya mandiri atau sukarela terjadi apabila elit hanya menganjurkannya atau menghimbau agar massa melakukan aktivitas-aktivitas politik. Dalam partisipasi politik yang sifatnya mandiri, elit tidak mempunyai kemampuan dan sekaligus juga tidak mempunyai kemauan untuk melakukan tindakan pemaksaan atau penindasan agar massa melakukan aktivitas-aktivitas politik.

Partai Politik merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi dan pemilu sebagai mekanisme penyertanya. Keikutsertaan dalam pemilu merupakan salah satu ciri khas dari partai politik. Sebagaimana disampaikan oleh Sigit Pamungkas (2011) partai politik didefinisikan sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum. Partai politik berbeda dengan organisasi sosial dan organisasi ekonomi. Partai politik didirikan bukan untuk memberi pelayanan sosial dan amal, bukan pula untuk meraih keuntungan ekonomi. Partai politik didirikan untuk meraih kekuasaan dan memperjuangkan ideologi yang dianutnya. Partai politik



juga berbeda dengan kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah namun tidak berusaha untuk meraih jabatan-jabatan publik.

Peran ideologis partai politik dipertanyakan oleh Guno Tri Tjahjoko (2011). Penelitian yang dilakukannya di Malang Raya menunjukkan partai politik telah bergeser jauh dari peran ideologis menjadi peran karikatif sebagaimana organisasi sosial. Alih-alih menguatkan ideologi bagi para kader dan pemilihnya, partai politik kemudian lebih mengambil peran memberikan banyak sumbangan pada pemilih baik secara organisasi maupun pribadi kader. Perilaku seperti ini dipandang lebih menarik bagi pemilih daripada pembinaan ideologis. Program partai pun terkesan pragmatis dan dalam usaha untuk bergerak ke tengah menjangkau pemilih yang lebih heterogen. Pada akhirnya hubungan antara partai dengan pemilih lebih bersifat transaksional dan mencapai puncaknya menjelang pelaksanaan pemilihan.

Terkait dengan peran media massa dalam politik di Indonesia, Kacung Marijan (2010) menjelaskan ada empat pola. Pertama, apa yang disampaikan media massa sesungguhnya hanya mengabarkan apa yang terjadi di dalam masyarakat, tidak ada agenda tersembunyi. Kedua, media tidak dapat menentukan apa yang dipikirkan tetapi dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan. Ketiga, media massa mempengaruhi pikiran dengan menentukan fokus pada suatu kejadian sehingga mempengaruhi penafsiran dari pemirsa. Dan terakhir media memiliki pengaruh langsung

pada sikap dan perilaku seseorang termasuk di dalamnya perilaku politik. Media tidak hanya merefleksikan realitas melainkan memiliki pengaruh terhadap realitas itu termasuk di dalamnya memberikan makna pada realitas.

Pemilih pun dapat bertindak secara otonom untuk menyatakan dukungannya pada peserta pemilu. Sebagaimana disampaikan Aulia A. Rachman (2006) pemilih dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, pemberi suara rasional yaitu pemilih yang memiliki pertimbangan sendiri dalam mendukung dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Pemilih jenis ini akan konsisten mendukung peserta yang sama ketika diberikan pilihan yang sama pada masa yang berbeda. Kedua, pemberi suara reaktif yaitu pemilih yang mendasarkan diri pada pertimbangan jangka panjang yang biasa berupa atribut sosial dan demografis seperti pekerjaan, pendidikan, agama, ras, tempat tinggal dan sebagainya. Ketiga, pemberi suara responsif yaitu pemberi suara yang kerap berpindah-pindah dukungan dan mendasarkan pada kepentingan jangka pendek sesuai dengan program dan janji kampanye peserta pemilu.

## **II. Metodologi**

Penelitian mengambil lokasi di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong. Pemilihan lokasi didasarkan pada alasan lokasi ini dipandang paling heterogen dan merepresentasikan kelurahan/desa lain di Lombok Timur. Heterogenitas ini tercermin dari berbagai aspek, seperti pekerjaan, suku bangsa, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan atribut sosial lain. Penelitian ini

tidak memastikan apa yang ditemukan dalam situs akan menggambarkan kondisi di kelurahan/desa lain. Namun penelitian ini meyakini hasil yang ditemukan menggambarkan kondisi partisipasi pemilih di Pancor pada saat ini.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (survei), yaitu kombinasi Multistage Random Sampling dan Cluster Random Sampling untuk area kelurahan. Adapun masing-masing sampel responden dari seluruh populasi yang ada diperoleh dengan proporsi jumlah penduduk dari data Kantor Kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih serta formula komposisi penentuan sampel secara ilmiah dan berjenjang. Data kemudian dikumpulkan dengan melakukan *spot checking*, dan dilakukan pengentrian serta analisa terhadap data lapangan. Riset survei lapangan dilakukan selama  $\pm$  satu pekan dengan memperhatikan akurasi dan tingkat kevalidannya, termasuk mapping sebelum surveyor responden masing-masing melalui instrumen menurut klasifikasi yang ditentukan dengan pertanyaan survei, yaitu riset mengetahui perilaku pemilih di kelurahan. Survei dipimpin oleh peneliti dengan surveyor berasal dari staf KPUD Lombok Timur. Kuesioner terdiri dari 32 pertanyaan dengan beragam kategori dan juga pertanyaan terbuka. Penelitian dilakukan dengan mendatangi dan menanyakan langsung kepada responden melalui instrumen penelitian yang telah disiapkan.

Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 40 (empat puluh) orang. Kelurahan Pancor terdiri atas 5 lingkungan dengan jumlah penduduk dan pemilih yang berbeda-beda. Berdasarkan proporsi jumlah pemilih pada pemilihan presiden tahun 2014 penelitian ini kemudian menentukan masing-masing jumlah responden dari jumlah pemilih yang terdata; Lingkungan Dayan Masjid 8 responden dari 1915 pemilih, Lauq Masjid 12 (2390), Bermi 10 (1989), Jorong 4 (1087), dan Muhajirin 6 (1257). Spotcheck dilakukan pada area terpilih dan mengambil 10% dari jumlah responden (=4 responden). Berdasarkan geografis, Lingkungan Dayan Masjid, Lauq Masjid, dan Bermi dianggap bersifat perkotaan sementara Muhajirin dan Jorong lebih bersifat pedesaan.

Berdasarkan jenis kelamin, responden sejak awal ditentukan ada perimbangan antara lelaki dan perempuan, sesuai dengan data Biro Pusat Statistik. Penelitian ini juga kemudian melihat latar belakang dari responden baik dari sisi suku-bangsa, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Berdasarkan tingkat pendidikan, hampir separuhnya tamatan SMA/ sederajat (42.50%), dan berturut-turut tidak tamat SD, lulusan SD/ sederajat, dan lulusan SMP/ sederajat masing-masing sebesar 10.00%. Sementara yang menempuh pendidikan tinggi sebesar 12.50%. Bila ditinjau dari sisi pekerjaan, terlihat beragam latar belakang responden. Proporsi tertinggi mengaku bekerja sebagai (ibu) rumah tangga sebesar 37.50%, lebih banyak sedikit yang bekerja sebagai pengusaha/wirausaha (35.00%). Sementara lainnya secara berturut-turut

PNS (2.50%), Pegawai Swasta (7.50%), Petani/Nelayan/Buruh (10.00%), Pelajar/Mahasiswa (2.50%), Pensiunan (2.50%), dan Lainnya (2.50%)

### **III. Tiga Pemilu Tiga Pemenang**

Untuk menjelaskan perilaku memilih di Kelurahan Pancor penelitian ini menggunakan pelaksanaan tiga pemilu di tingkat lokal. Definisi pemilu di tingkat lokal tidak hanya bermakna pemilu pada tingkatan lokal seperti pemilihan kepala daerah tetapi juga pemilu nasional yang terjadi di lokal Lombok Timur. Tiga pemilu yang dimaksud terdiri atas Pemilihan Umum Kepala Daerah Lombok Timur (Pemilukada Lotim) yang berlangsung tahun 2013, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014.

Pemilukada Lotim 2013 diikuti oleh empat pasangan calon, yaitu Sukiman Azmy dan Syamsul Lutfi (SUFI), Ali Bin Dahlan dan Khairul Warisin (ALKHAER), Abdul Wahab dan Lale Yaqutunnafis (WALY), serta Usman Fauzi dan Ichwan Sutrisno (MAFAN). Dua pasangan yang diramalkan akan bersaing dengan ketat yaitu SUFI yang didukung oleh NW PANCOR dan mayoritas partai politik di Lombok Timur serta selaku petahana, dan ALKHAER yang mana Ali BD merupakan bupati periode 2003-2008 dan peserta Pemilukada Lotim tahun 2008 dan kali ini muncul sebagai calon independen. Sementara pasangan WALY dianggap sebagai pasangan yang bisa saja muncul sebagai kejutan karena didukung oleh NW ANJANI. Pemilukada berlangsung satu putaran dimenangkan oleh ALKHAER dengan selisih suara yang sedikit saja (lihat tabel 1).

Sebagaimana pemilu nasional, pileg 2014 di Lombok Timur diikuti oleh dua belas partai politik. Pada pileg tahun 2014 Partai Demokrat yang didukung NW Pancor berhasil meraih suara terbanyak, dengan menempatkan 6 (enam) orang kadernya di DPRD Lombok Timur. Kesuksesan Partai Demokrat sebagai pemenang pileg tidak dapat dilepaskan dari dukungan NW PANCOR, dan kemudian berhasil menempatkan kadernya, Khairul Rizal, sebagai Ketua DPRD Lotim. Sebelumnya, Khairul Rizal adalah anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan menjadi Wakil Ketua DPRD. Selain sebagai politikus, dirinya juga dikenal sebagai suami dari Siti Rohmi Djalilah, Ketua DPRD Lotim sebelumnya dan juga kakak kandung dari TGB Zainul Majdi, Ketua Partai Demokrat NTB sekaligus tokoh sentral NW PANCOR. Partai politik lain mendapatkan perolehan suara secara merata, dan tidak ada partai yang dominan. (Lihat tabel 2)

Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JOKOWI-JK). Prabowo-Hatta didukung oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB. Sementara JOKOWI-JK didukung oleh partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu Partai NASDEM, PKB, PDIP, Partai HANURA, dan PKPI. Partai Demokrat pada pilpres ini memilih sebagai 'penyeimbang' sehingga kader-kadernya terpecah pada dua kubu yang berseberangan. Untuk lokal Lombok Timur, Pilpres dimenangkan oleh

Prabowo-Hatta dengan selisih suara yang cukup besar. Faktor apakah yang menjadi penentu kemenangan belum diketahui pasti. Faktanya NW PANCOR mendukung Prabowo-Hatta sementara NW ANJANI terlihat lebih mendukung pasangan JOKOWI-JK. (Lihat tabel 3)

#### **IV. Penjelasan Alternatif tentang Perilaku Memilih di Pulau Lombok**

Terdapat semacam keyakinan selama ini bila perilaku memilih di Lombok Timur khususnya, dan Lombok secara umumnya dipengaruhi oleh faktor pemimpin opini. Lebih spesifik pemimpin opini diperankan oleh tokoh agama – di Pulau Lombok disebut dengan Tuan Guru. Dengan pandangan seperti ini maka tiap kali pemilihan yang terjadi adalah perebutan atau saling klaim mendapatkan dukungan dari Tuan Guru. Tidak jarang seorang Tuan Guru kemudian diklaim oleh lebih dari peserta pemilihan. Logika yang dibangun, bila Tuan Guru sudah mendukung maka akan diikuti oleh pengikut (*jamaah*) yang jumlahnya begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok.

Tuan Guru utama yang begitu berpengaruh adalah Maulanasyekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid, pendiri dan pemimpin utama organisasi Nahdatul Wathan (NW). Kariernya sebagai pemuka agama dan politisi begitu cemerlang. Pernah menjadi pemimpin utama Masyumi untuk Sunda Kecil dan kemudian berpindah mendukung Partai Golkar sejak Orde Baru. Selain karier pribadi, kecermelangan juga ditunjukkan dengan keberhasilan mengembangkan NW ke seluruh Nusantara. Meskipun hubungan dengan berbagai madrasah yang tersebar bersifat pribadi

kultural, tidak ditangani secara formal organisatoris sebagaimana Muhammadiyah. Meskipun pada alumni berbagai sekolah NW yang dijuluki *arbituren* terdapat potongan dari gaji yang diperoleh sebagai bentuk terima kasih dan memelihara hubungan dengan organisasi.

Sepeninggal Maulanasyekh, NW tetap menjadi salah satu faktor utama dalam menjelaskan politik di Lombok. Dalam politik pemerintahan formal, perannya kemudian dilanjutkan oleh Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, yang menjadi Gubernur NTB selama dua periode sejak tahun 2008. Sebelumnya ia sempat menduduki jabatan sebagai anggota DPR sejak tahun 2004 mewakili Partai Bulan Bintang (PBB). Kadernya yang lain, Syamsul Lutfi dan Gde Syamsul menjadi anggota DPR sejak tahun 2014 masing-masing mewakili Partai Demokrat dan Partai Hanura. Sebelumnya Syamsul Lutfi menjadi Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2008-2013.

Lalu Mujiharta (2005) mengadakan penelitian yang bermaksud untuk menemukan tentang keterlibatan tuan guru (TG) dalam politik, terutama di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ditujukan pada perilaku TG pasca reformasi dengan membandingkannya dengan pengalaman Orde Baru (orba). Pentingnya penelitian tentang pergeseran orientasi politik TG karena memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu. Menurut Mujiharta, pergeseran orientasi politik TG memiliki pengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilu. Dalam penelitian ditemukan telah terjadi pergeseran orientasi perjuangan TG dalam kaitannya dengan politik. Pada suasana totaliter orba, TG tidak punya pilihan politik lain dengan



mendukung Golkar. Orientasi politik pada masa itu ialah untuk menyelamatkan eksistensi pondok pesantren atau lembaga pendidikan lain di bawah pimpinannya. Tanpa mendukung Golkar, akan banyak ditemui kesulitan baik dari birokrasi pendidikan maupun pendanaan. Pasca keterbukaan terjadi pergeseran orientasi politik. Dengan sistem “multipartai sederhana”, memberikan kelonggaran bagi TG untuk memilih salah satu dari sekian banyak partai sebagai afiliasi politiknya. Sistem dan suasana keterbukaan menyebabkan terjadinya pergeseran dari mempertahankan eksistensi lembaga menjadi harapan untuk meraih kekuasaan. Ditambahkan, pergeseran orientasi juga ditunjukkan dengan makin terlibatnya TG dalam perebutan beberapa jabatan dalam pemerintahan, terutama posisi anggota legislatif. Keterlibatan TG dalam politik ditujukan untuk menghindarkan adanya eksploitasi dan pemanfaatan keberadaannya untuk kemenangan pemilu oleh para politikus.

Penelitian yang dilakukan Bafadal dan Bambang Eka Cahyo Widodo (2005) mengenai peningkatan peroleh suara Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Legislatif tahun 2004 di Kabupaten Lombok Timur menemukan pentingnya peran TG. Peningkatan peroleh suara PBB tahun 2004 disebabkan tiga faktor; (1) struktur kepengurusan partai di tingkat lokal yang mengakomodir Pengurus NW, (2) Kandidat dalam daftar calon yang banyak terdiri dari mereka yang selama ini dikategorikan sebagai tokoh NW, dan (3) isu kampanye berupa penegakan syariat Islam yang menarik

perhatian para pemilih. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, faktor utama yang menyebabkan peningkatan perolehan suara PBB pada Pemilu 2004 di Kabupaten Lombok Timur adalah dukungan dari NW. Pesona TG Zainul Majdi, sebagai Ketua Dewan Tanfidziah NW, mampu menarik simpati dari jamaah NW, maupun dari masyarakat luas. Sistem patronase yang masih kental dalam masyarakat Lombok Timur menempatkan sosok TG sebagai tokoh agama yang dijunjung dan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Fatwa atau keputusan TG kerap tidak hanya bersifat profan (keduniawian) tetapi juga mengandung nilai ukhrawi.

Ahmad Husni Mubarak (2006) kemudian membahas mengenai bagaimana partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 berebut untuk mendapatkan dukungan NW. Sebagai kelompok kepentingan yang memiliki pengikut terbesar di Lombok maka dukungan NW diharapkan akan menjadi faktor penentu kemenangan partai politik tersebut. Memanfaatkan sifat NW yang selama ini tidak menjauh dari politik praktis maka dua partai kemudian mendapatkan dukungan, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar. Dukungan ini tidak sekadar himbuan massa tetapi juga tokoh NW tidak segan untuk menjadi juru kampanye memenangkan partai politik yang didukungnya.

Namun pada tahun 2010 asumsi NW sebagai faktor utama mendapatkan keraguan. Studi yang dilakukan Bafadal (2014) menunjukkan keraguan dimulai dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lombok Tengah.

Pasangan calon yang didukung NW ternyata mengalami kekalahan meskipun mampu melaju hingga putaran kedua. Padahal pasangan L. Gde Sakti-Elyas Munir (SALAM) ketika itu didukung oleh seluruh faksi yang ada di NW namun ternyata tak mampu mendongkrak perolehan suara. Pasangan ini dikalahkan oleh Suhaili-L. Normal Suzana (Maiq-Meres) yang didukung oleh organisasi islam lain (baca:Yatofa). Kekalahan pasangan yang didukung NW mengejutkan banyak pihak, dan memicu pemikiran untuk meninjau kembali asumsi NW sebagai faktor dominan dalam politik di NTB. Peninjauan kembali atas dominasi NW kemudian menguat pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Lombok Timur tahun 2013. Ketika itu pasangan Sukiman-Lutfi (SUFU) yang didukung NW, juga pasangan petahana, meraih suara lebih sedikit dibandingkan pasangan Ali BD-Khaerul Warisin (ALKHAER). Pada saat yang bersamaan digelar pula pelaksanaan Pemilukada Provinsi NTB, dimana Tuan Guru Bajang Zainul Majdi-M. Amin (TGB-Amin) yang didukung NW memenangkan pemilihan. Mengapa di NTB menang sementara di Lombok Timur kalah? Hipotesis yang ditawarkan sosok personal TGB Zainul Majdi telah melampaui suara organisasi NW.

#### **V. Figuritas, Tokoh Panutan, dan Pemilih Otonom**

Penelitian ini menemukan tingginya angka partisipasi memilih. Dari 40 responden, 34 responden menyatakan diri ikut memilih sementara sisanya tidak. Ini berarti 85% dari responden menyatakan diri memilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Adapun alasan untuk memilih

mayoritas didorong oleh keinginan sendiri. Lainnya secara berturut-turut karena figur populer, himbauan tokoh panutan, kesamaan partai politik, dan terakhir sevisi. (Lihat Tabel 4)

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dalam pemilihan legislatif pemilih bersifat otonom paternalistik. Dikatakan bersifat otonom karena partisipasi memilih didorong keinginan sendiri bukan atas dorongan lain. Namun demikian peran elit dalam memobilisasi juga tidak dapat dikesampingkan. Selisih di antara kedua tidak begitu besar. Bila figur populer dan himbauan tokoh diasumsikan sebagai jenis partisipasi mobilisasi maka angkanya melampaui partisipasi otonom.

Dalam Pemilihan Presiden tahun 2014, tingkat partisipasi memilih lebih tinggi. Penelitian ini menemukan 35 orang menyatakan diri ikut memilih. Artinya 87.5% pemilih menggunakan haknya. Mengapa demikian? Jawaban singkat hal ini disebabkan terlalu banyak calon dalam pemilihan legislatif sehingga membingungkan pemilih. Kebingungan ini kemudian mendorong mereka tidak menggunakan haknya. Adapun alasan menggunakan partisipasi memilih mayoritas karena figur populer. Lainnya secara berturut-turut keinginan sendiri, himbauan tokoh panutan, kesamaan partai politik, dan terakhir sevisi. (Lihat Tabel 5)

Dalam Pemilihan Presiden dapat disimpulkan partisipasi disebabkan karena figuritas dari peserta pemilu. Hal ini tidak lepas dari massifnya kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di berbagai saluran komunikasi massa. Peserta pemilu begitu teringat dalam benak pemilih

dengan beragam persepsi yang dihasilkan. Selain itu, faktor keinginan sendiri dan himbauan tokoh juga menjadi faktor lain yang cukup menentukan partisipasi memilih dalam pemilihan presiden yang lalu.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah angka partisipasi juga tinggi, di atas 80% tepatnya 82.5% menyatakan menggunakan hak pilihnya. Adapun dasar dari partisipasi memilih terutama didorong oleh keinginan sendiri, berturut-turut figur populer, himbauan tokoh panutan, kesamaan partai politik, dan terakhir senang dan sevisi (lihat Tabel 6)

Dari data tersebut ditemukan fakta bahwa partisipasi pemilih bersifat otonom penokohan. Disebut otonom karena penggunaan hak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah didorong oleh keinginan sendiri. Meskipun demikian pada sisi lain figur populer dan himbauan tokoh tidak dapat dikesampingkan dan menjadi faktor lain yang mendorong partisipasi memilih.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini menemukan tiga faktor dominan dalam menentukan perilaku pemilih – sebagai salah satu bentuk partisipasi memilih – di Kelurahan Pancor yaitu Figur Populer, Himbauan Tokoh, dan Keinginan Sendiri. Dengan demikian terlihat ada jenis partisipasi yang terombang-ambing dari bentuk otonom dan mobilisasi. Hal ini menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang kuatnya figuritas dan pengaruh tokoh dalam menentukan perilaku memilih di Pulau Lombok.

Selain itu, penelitian ini menemukan rendahnya faktor partai politik dalam tiap pelaksanaan pemilu. Alasan kesamaan partai politik dalam menentukan pilihan dalam pemilu kecil sekali dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan umum kepala daerah berturut-turut 5.13%, 2.5%, dan 2.63%. Data ini mengindikasikan kekhawatiran para sarjana tentang terjadinya deparpolisasi, ketika kehadiran partai politik tidak dirasakan dan dianggap penting oleh pemilih. Partai Politik kemudian hanya dijadikan jalan bagi calon untuk ikut serta dalam pemilihan umum karena peraturan perundangan mensyaratkan demikian.

Tingginya angka partisipasi memilih tidak dapat dilepaskan dari kepuasan pemilih sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebagaimana diketahui bersama, pasca reformasi terjadi perubahan dalam partisipasi memilih dari yang semula didasari ketakutan menjadi penuh kesadaran. Memilih kemudian menjadi hak bukan lagi kewajiban sebagaimana masa lalu. Mayoritas pemilih menyatakan kepuasan bahkan sangat puas (65%) terhadap sosialisasi pendidikan pemilih, dan hanya 22.5% yang tidak puas, sisanya biasa saja. (lihat Tabel 7)

Ada berbagai saluran sosialisasi pendidikan pemilih yang digunakan. Mayoritas responden menilai bahwa adanya sosialisasi melalui media cukup ampuh (32,5%) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memilih di TPS. Selanjutnya informasi yang tertera pada ruang publik maupun mencari informasi sendiri sebesar 17,5%, melalui pengurus parpol yang

menyampaikan kegiatan internalnya sebesar 15% dan melalui corong penerangan masyarakat sebesar 15%. Adapun penyampaian langsung dan melalui forum oleh pelaksana teknis pemilu bergugus sebesar 20%. (lihat tabel 8)

Pentingnya sosialisasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi memilih dalam pemilu. Sebagian besar responden – mencapai 2/3 dari total – menyatakan persetujuannya sosialisasi mampu meningkatkan partisipasi memilih, bahkan 30% menyatakan sangat setuju. Sisanya menjawab tidak tahu. (lihat Tabel 9)

Terkait dengan manfaat pemilu terhadap kehidupan demokrasi, mayoritas responden menyatakan sangat bermanfaat (72.5%) bahkan yang menjawab sangat bermanfaat sebesar 22.5%. Hal ini menegaskan penerimaan mayoritas pemilih di Indonesia terhadap demokrasi beserta perangkat pendukungnya seperti pemilihan umum. Meskipun mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim yang dalam kehidupannya merujuk pada ajaran Tuhan melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasul namun penerimaan terhadap demokrasi yang berasal dari tradisi Yunani berdasar pemikiran manusia cukup besar. (bandingkan dengan Saiful Mujani, *Muslim Demokrat*). Hanya 5% dari responden yang menjawab biasa saja. (lihat Tabel 10)

Meskipun pada masa pasca reformasi warganegara diberikan kebebasan untuk menggunakan atau tidak hak memilihnya mayoritas responden menyatakan pentingnya partisipasi dalam pembangunan demokrasi. Lebih

dari setengah responden menyatakan pentingnya hak pilih dalam pembangunan demokrasi. Bahkan lebih sepertiga menyatakan sangat penting, hanya sedikit responden yang menjawab biasa saja (Lihat Tabel 11)

Persepsi positif atas partisipasi memilih tidak lepas dari penilaian masyarakat terhadap pengelolaan teknis pemilu. Mayoritas responden menyatakan puas terhadap pengelolaan teknis pemilu oleh penyelenggara pemilu. Responden yang menjawab tidak puas dan biasa saja memang ada namun jumlahnya tidak besar. (Lihat tabel 12)

Penilaian positif terhadap pengelolaan teknis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan sarana dan prasarana penunjang pemilu. Mayoritas responden menyatakan sarana dan prasarana pemilu sudah memadai baik keseluruhan dan sebagian. Hanya sedikit responden yang menyatakan sarana prasarana yang ada belum memadai. (lihat Tabel 13)

Meskipun memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan pemilu namun responden menginginkan perbaikan terhadap proses pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang. Pendaftaran Pemilih merupakan bagian yang mendapat perhatian utama bagi responden untuk diperbaiki dalam pemilu berikutnya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin seorang warganegara menggunakan haknya dalam pemilu. Peraturan Pelaksana dan Sosialisasi menjadi bagian lain yang mendapat perhatian dari responden. (lihat Tabel 14)



Terkait dengan preferensi dalam melakukan partisipasi dalam pemilu ditemukan fakta kuatnya faktor tokoh dalam masyarakat (pemimpin opini). Ada beragam jenis tokoh dalam masyarakat. Tokoh agama menjadi figur penting yang menentukan preferensi responden dalam melaksanakan hak pilihnya. Selain itu ada tokoh budaya, tokoh pemerintahan, tokoh partai, dan pemuda. (lihat Tabel 15)

Bukan hanya tokoh, media juga menjadi salah satu faktor yang menjadi preferensi dari pemilih. Responden dalam penelitian ini menganggap media televisi paling efektif untuk menyampaikan sosialisasi pemilu, disamping media-media lainnya (radio, koran dan ruang publik) sebagai sarana sosialisasi. Sedangkan media lainnya berupa seni pertunjukan, corong penerangan dan sebagainya. (Lihat Tabel 16)

Penelitian ini juga memberikan pertanyaan terbuka bagi responden. Beberapa jawaban yang diberikan responden terutama berkisar pada dua hal, yaitu Sosialisasi Pemilu dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat menginginkan sosialisasi pemilu dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan langsung terhadap elemen masyarakat pemilih, dengan menyampaikan, (1) informasi kepemiluan, (2) pendaftaran pemilih, (3) tahapan pemilu, (4) tata cara memilih, (5) alat peraga sosialisasi, (6) visi misi calon/peserta pemilu dan sebagainya. Sementara terkait dengan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu khususnya di TPS dari aspek: (1) SDM, (2) kapasitas pemahaman tata kelola, (3) rekrutment petugas teknis pemilu pada tingkatan TPS, (4) sarana

penunjang, (5) keamanan penghitungan, (6) distribusi kotak suara, (7) transparansi dan waktu efektif pengumuman perolehan pemilu.

## **VI. Kesimpulan**

Secara umum penelitian ini menyimpulkan partisipasi memilih dalam pemilu di Kelurahan Pancor tergolong tinggi. Tingginya angka partisipasi tidak dapat dilepaskan dari massifnya sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tokoh panutan menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan partisipasi memilih sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Apakah dengan demikian dikatakan jenis partisipasi yang terjadi mobilisasi? Penelitian ini menyatakan jawaban persetujuan. Ke depan diharapkan muncul inovasi sosialisasi pendidikan pemilih yang melibatkan stakeholder untuk menciptakan pemilih yang otonom. Termasuk di dalamnya keragaman jumlah alat peraga dan media sosialisasi terkait tata cara pemilihan.

Sementara itu terkait dengan perilaku memilih, penelitian ini menemukan tiga faktor yaitu Figuritas, Tokoh Panutan (*vote getter*), dan kesadaran sendiri pemilih. Temuan dalam penelitian ini menguatkan asumsi masih pentingnya faktor figur dan tokoh panutan dalam perilaku memilih di Pulau Lombok. Kedua hal ini mampu meredam faktor visi dan misi peserta pemilu, dan yang lebih memperhatikan ketika kehadiran partai politik tidak mendapat respon yang cukup baik. Kemandirian pemilih ke depannya mungkin akan terus meningkat dengan makin terbukanya informasi dan iklim kebebasan pada masa reformasi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Husni Mubarak, 2006, *Afiliasi Ormas terhadap Partai Politik*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada : Yogyakarta

Aulia A. Rachman, 2006, *Citra Khalayak tentang Golkar*, PSAP : Jakarta

Bafadal, Robyan Endruw dan Bambang Eka C.W., 2005, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Peningkatan Perolehan Suara Partai Bulan Bintang pada Pemilu 2004 di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Volume 15 Nomor 1 Februari 2006

Bafadal, Robyan Endruw, 2009, *Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol I No 1 Juli 2009

\_\_\_\_\_, 2014, *Senjakala Politik NW*, Laporan Penelitian Internal STKIP Hamzanwadi Selong : Selong

Gabriel A. Almond, *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*, dalam Mohtar Mas'oeed dan Colin Mc Andrews (ed.), 1978, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan ketujuhbelas, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

- Guno Tri Tjahjoko, 2011, *Bergesernya Peran Parpol di Era Multipartai*,  
Jurnal Sospol, Vol 1 No 1 Maret 2011
- Haryanto, 2005, *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*, JPP FISIPOL  
UGM : Yogyakarta
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*,  
Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Josef Kristiadi, 1993, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih*, Disertasi  
Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada :  
Yogyakarta
- Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi  
Pasca-Orde Baru*, Kencana Press : Jakarta
- Lalu Mujiharta, 2005, *Pergeseran Orientasi Politik Tuan Guru*, Thesis  
Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada :  
Yogyakarta
- Leo Agustanto, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar:  
Yogyakarta
- Muhammad Asfar, 2006, *Perilaku Pemilih di Indonesia 1955 – 2004*,  
Pustaka Eureka : Surabaya
- Menang Pilkada Bisa Murah, *Suara NTB Kamis 18 Juni 2015*
- Saiful Mujani dan R. William Liddle, tt, *Leadership, ID Party and Religion*,  
diunduh dari freedom. Insitute.org

Saiful Mujani, 2002, *Muslim Dmeokrat : Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Gramedia : Jakarta

Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrido Ambardi, 2011, *Kuasa Rakyat : Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Mizan : Jakarta

Tabel 1. Perolehan Suara Pemilukada Lotim 2013

NO.	Pasangan	Suara	(%)
<b>1</b>	<b>ALKHAER</b>	<b>272.726</b>	<b>44,28</b>
2	WALY	61.276	9,95
3	SUFI	255.387	41,47
4	MAFAN	26.510	4,30

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Legislatif tahun 2014

NO.	Nama Partai Politik	Suara	(%)
1	Partai NASDEM	47.627	7,65
2	PKB	51.220	8,23
3	PKS	52.204	8,38
4	PDIP	43.198	6,94
5	Partai Golkar	63.423	10,19
6	Partai Gerindra	51.700	8,30
<b>7</b>	<b>Partai Demokrat</b>	<b>82.784</b>	<b>13,29</b>
8	PAN	53.404	8,58
9	PPP	49.246	7,91
10	Partai HANURA	58.944	9,47
14	PBB	47.401	7,61
15	PKPI	21.556	3,46

Tabel 3. Perolehan Suara Pemilihan Presiden tahun 2014

NO.	Pasangan	Suara	(%)
<b>1</b>	<b>PRAHARA</b>	<b>471.546</b>	<b>75,19</b>
2	JOKOWI-JK	155.595	24,81

Tabel 4. Alasan Partisipasi Memilih dalam Pemilihan Legislatif

Variabel	Resp.	%
Figur Populer	11	28.21
Senang dan sevisi	1	2.56
Himbauan Tokoh	10	25.64
Kesamaan Parpol	2	5.13
Keinginan Sendiri	15	38.46

Tabel 5. Alasan Partisipasi Memilih dalam Pemilihan Presiden

Variabel	Resp.	%
Figur Populer	19	47.50
Senang dan sevisi	1	2.50
Himbauan Tokoh	7	17.50
Kesamaan Parpol	1	2.50
Keinginan Sendiri	12	30.00

Tabel 6. Alasan Partisipasi Memilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Variabel	Resp.	%
Figur Populer	11	28.95
Senang dan sevisi	3	7.89
Himbauan Tokoh	6	15.79
Kesamaan Parpol	1	2.63
Keinginan Sendiri	17	44.74

Tabel 7. Kepuasan terhadap Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Variabel	%
Sangat Puas	12.50
Puas	52.50
Biasa Saja	12.50
Tidak Puas	22.50

Tabel 8. Bentuk Sosialisasi Pendidikan Pemilih

Variabel	%
Pertemuan Langsung	10.00
Forum Pertemuan	10.00
Corong Penerangan	15.00
Media	32.50
Partai Politik	15.00
Mencari Informasi	17.50

Tabel 9. Pentingnya Sosialisasi untuk Meningkatkan Partisipasi Memilih

Variabel	%
Sangat Setuju	30.00
Setuju	67.5
Biasa Saja	0
Tidak Setuju	0
Sangat Tidak Setuju	0
Tidak Tahu/Tidak Jawab	2.50



Tabel 10. Manfaat Pemilu bagi Kehidupan Demokrasi

Variabel	%
Sangat Bermanfaat	22.50
Bermanfaat	72.50
Biasa Saja	5.00
Tidak Setuju	0
Sangat Tidak Setuju	0
Tidak Tahu/Tidak Jawab	0

Tabel 11. Penggunaan Hak Pilih dalam Pembangunan Demokrasi

Variabel	%
Sangat Penting	35
Penting	57.50
Biasa Saja	7.50
Tidak Penting	0
Sangat Tidak Penting	0
Tidak Tahu/Tidak Jawab	0

Tabel 12. Penggunaan Hak Pilih dalam Pembangunan Demokrasi

Variabel	%
Sangat Puas	12.50
Puas	70.00
Biasa Saja	10.00
Tidak Puas	7.50
Sangat Tidak Puas	0.00
Tidak Tahu/Tidak Jawab	0.00

Tabel 13. Persepsi terhadap Sarana Prasarana Pemilu

Variabel	%
Sudah Memadai	82.50
Memadai Sebagian	5.00
Tidak Memadai	10.00
Tidak Tahu/Tidak Jawab	2.50

Tabel 14. Proses Penataan Pelaksanaan Pemilu

Variabel	%
Pendaftaran Pemilih	35.00
Sosialisasi Memilih	25.00
Sosialisasi Calon Peserta	2.00
Peraturan Pelaksana	28.00
Masa Kampanye	5.00
Tidak Tahu/Tidak Jawab	5.00

Tabel 15. Preferensi Tokoh terhadap Peningkatan Partisipasi Memilih

Variabel	%
Tokoh Agama	77.00
Tokoh Pemerintahan	12.00
Tokoh Partai	28.00
Tokoh Pemuda	3.00
Lainnya (Budaya, Keluarga)	5.00

Tabel 16. Preferensi Media terhadap Peningkatan Partisipasi Memilih

Variabel	%
Koran	5.00
Radio	2.00
Televisi	60.00
Ruang Publik	30.00
Lainnya	3.00

## **REKOMENDASI KEGIATAN**

Sebuah organisasi telah melakukan lompatan besar bila muncul pikiran dalam proses pembuatan kebijakan mendasarkan diri pada hasil penelitian. Dengan logika pikir seperti ini maka kebijakan yang dihasilkan berdasar pada apa yang terjadi di tengah publik. Pada akhirnya kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan publik. Hal ini merupakan antitesa dari berbagai kebijakan yang dikritik banyak pihak lebih bersifat proyek, bukan berdasarkan kebutuhan nyata dalam. Kebijakan yang bersifat proyek kemudian menghasilkan produk monumental namun miskin fungsi dan manfaat. Hal ini tersebut produk tersebut didasarkan bukan pada kebutuhan yang nyata.

Partisipasi memilih dalam pemilu pada masa reformasi menunjukkan trend yang menurun. Ada banyak faktor penjelas yang dihadirkan. Sesungguhnya ini bukan hanya khas Indonesia tetapi juga negara berkembang lain. Bahkan Amerika Serikat yang selama ini dipandang sebagai rujukan pelaksanaan demokrasi partisipasi memilih hanya sekitar 60% saja. Meskipun jumlah yang rendah tidak memiliki dampak terhadap legalitas peserta pemilu namun mengkhawatirkan dalam hal legitimasi.

Ke depan diharapkan kegiatan penelitian partisipasi memilih dipandang penting untuk dilakukan berkelanjutan dengan perbaikan dalam banyak hal, termasuk metodologi penelitian dan pembiayaan. Dengan perbaikan metodologi dan dilakukan secara terus menerus akan didapatkan jawaban

mengenai pertanyaan di sekitar partisipasi memilih. Survei (sigi) hanya menggambarkan kondisi saat ini, bukan masa depan. Pemilih bersifat dinamis sehingga mungkin berubah dari masa ke masa. Namun dengan penelitian berkesinambungan akan didapatkan penjelasan yang lebih lengkap dengan melihat kecenderungan dari hasil penelitian.

Faktor pembiayaan akan berpengaruh pada luasan cakupan penelitian. Dengan pembiayaan yang cukup suatu penelitian akan mencakup wilayah yang lebih besar. Ini tentu saja akan mampu menjelaskan lebih baik terkait partisipasi memilih. Penjelasan yang lebih baik, lengkap, dan luas akan membantu penyelenggara pemilu dan pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi memilih di Indonesia.

<b>PROFIL PELAKSANA</b>		
<b>RISET PARTIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR</b>		
<b>J U D U L :</b>		
<b>FIGURITAS, TOKOH PANUTAN, DAN KEMANDIRIAN PEMILIH</b>		
<b>PELAKSANA RISET</b>		
1.	NAMA	MUH. SALEH, SIP., MH
	PENDIDIKAN TERAKHIR	UNV. MATARAM HUKUM PEMERINTAHAN (LULUS 2006)
	KARYA TULIS YANG TELAH DIPUBLIKASI	PENERAPAN NILAI NILAI DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN KAMPUS (TAHUN 2007)  PERAN AWIQ AWIQ DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA (TAHUN 2008)
	PEKERJAAN	KETUA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.	NAMA	Drs. MUSA ALHADY
	PENDIDIKAN TERAKHIR	UNV. BRAWIJAYA (1984)
	KARYA TULIS YANG TELAH DIPUBLIKASI	-
	PEKERJAAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.	NAMA	TAHARUDIN, SH
	PENDIDIKAN TERAKHIR	UNV. MATARAM / HUKUM (1992)
	KARYA TULIS YANG TELAH DIPUBLIKASI	PARTISIPASI MEDIA DALAM MENGAWASI PEMILU (TABLOID LENSA RAKYAT 2004)  PROFIL ANGGOTA DPRD KAB. LOMBOK TIMUR ; SIAP MENGABDI UNTUK RAKYAT (TABLOID LENSA RAKYAT 2004)
	PEKERJAAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

4.	NAMA	ZINURRAIN, S. Pd
	PENDIDIKAN TERAKHIR	STKIP HAMZANWADI SELONG (2006)
	KARYA TULIS YANG TELAH DIPUBLIKASI	-
	PEKERJAAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
5.	NAMA	M. LUTFI SYARIFUDDIN, S. Ag
	PENDIDIKAN TERAKHIR	IAIH HAMZANWADI PANCOR (2000)
	KARYA TULIS YANG TELAH DIPUBLIKASI	-
	PEKERJAAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KONSULTAN RISET :		
6.	NAMA	ROBYAN ENDRUW BAFADAL, M.Si
	PENDIDIKAN TERAKHIR	PROGRAM STUDY ILMU POLITIK PASCA SARJANA UGM
	KARYA TULIS YANG TELAH DIPUBLIKASI	BUKU POLITIK ISLAM POLITIK
	PEKERJAAN	PENGAJAR PADA STKIP HAMZANWADI SELONG LOMBOK TIMUR